

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun desa meliputi upaya untuk memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat desa secara terpadu dengan mengembangkan semangat gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan inisiatif masyarakat. Dengan meningkatkan dan mengembangkan desa secara mandiri diharapkan dapat tercipta desa yang mandiri dan berdikari. Dalam pembangunan desa, fokusnya adalah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa (Adisasmita, 2006: 4).

Pembangunan di pedesaan merupakan suatu usaha untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan di wilayah pedesaan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan pedesaan adalah peningkatan sarana dan prasarana, seperti jaringan jalan, yang dapat membantu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat di pedesaan. Dengan memperkuat infrastruktur di pedesaan diharapkan dapat memperkuat perekonomian di wilayah tersebut dengan cara yang efektif dan berkelanjutan (Adisasmita, 2006: 17-19).

Dalam waktu singkat, pembangunan jalan akan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi sedangkan dalam jangka menengah dan panjang akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait.

Oleh karena itu, Membangun jalan yang baik merupakan sebuah strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan mobilitas barang yang lebih baik. (Sasmito, 2017: 73).

Menurut UU No 38 tahun 2006 tentang Jalan, jalan adalah sebuah fasilitas transportasi darat yang meliputi segala bagian, termasuk bangunan dan perlengkapannya, yang ditujukan untuk lalu lintas, dan dapat berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas air, atau di bawah air. Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat karena distribusi barang dan jasa sulit dilakukan tanpa jalan yang memadai. Kondisi jalan yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan jalan menjadi sangat penting karena dapat membuka peluang kemajuan dan tumbuhnya berbagai aktivitas di daerah-daerah yang menjadi jalur perlintasan tersebut. (Riti, dkk., 2018:3).

Membangun jalan di wilayah pedesaan memiliki berbagai hambatan, terutama dalam hal pembebasan lahan. Namun, tidak efisien jika semua lahan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah belum mengetahui dengan pasti penggunaan optimal dari seluruh lahan tersebut dan di sisi lain, lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat sebelum UUD 1945 diberlakukan. Penggunaan optimal lahan juga dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan penggunaan lahan di lapangan. Misalnya, pada satu waktu, sebidang lahan lebih optimal jika digunakan untuk tanaman pangan, namun pada waktu lain, manfaatnya lebih optimal jika dijadikan lokasi industri karena dapat menyerap lebih banyak

tenaga kerja. Kebijakan pemerintah dapat meliputi kebijakan penetapan atau pengaturan, pengarahan, dan pembebasan lahan. Ketiga kebijakan ini tidak selalu terpisah satu sama lain, tetapi bisa juga dikombinasikan (Tarigan, 2005: 55).

Kebijakan pemerintah yang bersifat membebaskan di Indonesia tidak sepenuhnya merujuk pada penggunaan lahan yang benar-benar bebas. Setiap lahan harus tunduk pada undang-undang dan peraturan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUH Pidana, KUH Perdata, dan undang-undang lainnya. Kebijakan membebaskan ini relatif, yang berarti tidak diatur secara khusus selain oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku umum. Kebijakan membebaskan merujuk pada penggunaan lahan yang tidak diatur atau diarahkan oleh pemerintah. Banyak lahan yang belum diatur atau diarahkan terutama pada lahan di luar kota yang umumnya digunakan sebagai lahan pertanian karena kepadatan penduduk masih rendah dan lahan datar sehingga erosi sangat kecil. Dalam hal ini, pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut (Tarigan, 2005 : 57).

Pentingnya kepemilikan tanah bagi semua pihak tidak dapat disangkal. Bagi masyarakat adat, tanah ulayat dianggap sebagai warisan nenek moyang yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar eksistensinya tetap terjaga. Mereka bahkan bersedia mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka. Namun, di sisi lain, pembangunan jalan membutuhkan lahan dalam

jumlah yang cukup besar. Jika tidak tersedia tanah yang memadai, maka proyek pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan mungkin terhenti secara mendadak. Oleh karena itu, sering kali tanah milik atau ulayat menjadi korban dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Meskipun demikian, karena tanah memiliki makna religius dan magis yang kuat bagi masyarakat adat setempat, maka pembebasan lahan perlu dilakukan dengan cara dan prosedur yang tepat dan beretika (Mudjiono, 2004: 152).

Masyarakat seharusnya menerima dan patuh terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan umum agar sengketa terjadi lebih jarang. Namun, dalam kenyataannya, program pembebasan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan konflik antara pemerintah dan pemilik tanah yang terdampak. Kendala dalam pembebasan tanah ini dapat menghambat program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Masalah yang paling rumit dalam pembebasan tanah adalah kesulitan mencapai kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pembangun. Oleh karena itu, pemerintah tidak membiarkan mekanisme pasar menentukan kepemilikan tanah sehingga masalah kepemilikan lahan sering memicu konflik.

Di Indonesia sering terjadi penolakan atau resistensi dari masyarakat terhadap pembangunan. Beberapa diantaranya, penolakan atau resistensi ini terjadi pada pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Kota Solo Provinsi Jawa Tengah membawa pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat sebab sawah lestari terdampak yang dilewati oleh tol. Pembangunan jalan tol JORR Hankam-cikunir juga terancam berhenti karena memiliki masalah pembebasan lahan yang belum

selesai dengan masyarakat. Masalah resistensi dan penolakan juga terjadi di Kecamatan Batipuh, Nagari Batipuh Ateh, Kabupaten Tanah Datar. Wilayah ini terkenal sebagai daerah agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik itu pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Tahun ini, pemerintah telah memulai pembangunan jalan alternatif di Nagari Batipuh Ateh. Proyek tersebut dimulai dengan memperbaiki kualitas jalan yang sudah ada, karena pembukaan jalan baru masih terkendala oleh masalah pembebasan lahan dan keterbatasan dana

Tabel 1. 1
Lahan Yang Terdampak Pembangunan Jalan

No	Nama	Luas Lahan (m)	Isi lahan
1	Ira	20	Perkebunan
2	Pit	105	Perkebunan
3	Andan	105	Perkebunan (Kopi, adam bunggu)
4	Darnalis	30	Perkebunan (pisang, talas)
5	En	40	Perkebunan
6	Labuak	350	Perkebunan (Kopi) dan sawah
7	Ubai	20	Perkebunan
8	Ati	25	Perkebunan
9	Nurima	350	Sawah
10	Sari	205	Sawah
11	Juli	150	Perkebunan (cabe dan ubi batang)
12	Sawali	100	Sawah
13	Eli	100	Sawah
14	Idan	200	Sawah
15	Timah	300	Sawah

Sumber: Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas ini, pembangunan jalan ini dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Batipuh Ateh. Observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan warga setempat yang bernama Darnalis menyatakan pembangunan jalan

alternatif dari Balai Birugo Jorong Balai Sabuah menuju Sibusuak Jorong Subarang dibangun oleh pada pemerinatahan Dt.Sinaro Alam Nan Putih (Wali Nagari Batipuh Ateh periode 2009– 2020). Dalam pembangunan jalan alternatif Nagari Batipuh Ateh pada tahun 2010 dilakukan pelebaran jalan Gauang dan tahun 2018 dilanjutkan dengan pelebaran jalan Balai Sabuah-Subarang. Pembuatan jalan ini menggunakan dana desa dengan menggiatkan kembali semangat gotong royong masyarakat setempat.

Pembangunan jalan alternatif yang awalnya dibangun dengan menggunakan dana perorangan dan dilanjutkan dengan menggunakan dana desa dari pemerintahan nagari pada tahun 2010 sebagai penghubung kawasan atau pemukiman dalam desa. Dulu, jalan ini hanya merupakan sebuah jalur kecil yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dengan ± 1.000 anak tangga dan persawahan ini sekarang dibangun dengan lebar badan jalan 4 meter, panjang 2 km dengan rencana pembangunan jalan beton. Jalan ini merupakan akses masyarakat Nagari Batipuh Ateh untuk melakukan aktivitas perekonomian. Area pembangunan yang terdampak berupa persawahan yang dimiliki tiga keluarga pada lahan milik ulayat Kaum Panyalai dan Sikumbang, perkebunan, tiga irigasi yaitu Banda Rang Koto Banda Bungo dan Banda Sabu. Dalam pembangunan ini pemilik tanah tidak mau menyerahkan lahan persawahan mereka kepada pemerintahan nagari. Adanya jalan alternatif ini, menjadi awal penolakan bagi pemilik lahan persawahan.

Diduga konflik ini terjadi antara pemilik tanah yang rencananya akan dibebaskan dengan perangkat nagari berkaitan dengan pertentangan lahan untuk pembangunan jalan. Untuk menghubungkan Jorong Balai Sabuah dengan Jorong

Subarang diperlukan pembangunan sebuah jalan alternatif. Namun, pembangunan jalan ini terhenti karena adanya Sungai Gunung Merapi yang mengalir di antara kedua jorong tersebut. Untuk itu, pembangunan jalan dilanjutkan dengan cara memperlebar jalur yang sudah ada agar dapat melintasi sungai dan menghubungkan kedua jorong tersebut. Pembangunan jalan dari Gauang ke Subarang terindikasi terjadinya konflik atau pertentangan. Protes pemilik tanah untuk dijadikan jalan sehingga pemerintah nagari memberhentikan proses pembangunan jalan tersebut. Penyelesaian konflik antara pemerintahan nagari dengan warga pemilik lahan sudah dilakukan tetapi tidak menemukan titik terang dari permasalahan yang ada. Diduga pemilik tanah protes karena tidak ada ganti rugi sementara menurut pihak pemerintahan Nagari Batipuh Ateh memang tidak ada ganti rugi karena demi kepentingan bersama.

Melatar belakangi penulis untuk meneliti mengenai hal ini, salah satu pembangunan yang menimbulkan penolakan bagi masyarakat akibat pembangunan tanpa alasan yang jelas, penolakan pemberian area persawahan didasarkan tidak adanya pergantian area lahan yang diambil oleh pemerintahan sehingga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dalam pembangunan jalan alternatif di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan dalam pembangunan prasarana khususnya pembangunan jalan yang menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan bagi pemerintahan Nagari Batipuh Ateh. Mengingat peran dan kondisi pembangunan infrastruktur penting

bagi lingkungan di desa dapat bergerak dengan baik dan terhindar dari kesulitan yang ada karena dengan adanya pengerjaan saluran saluran air, pengerjaan jalan utama, bagian-bagian jalan sebagai pematokan jalan. Pembangunan jalan alternatif di pedesaan di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perbaikan infrastruktur transportasi, seperti jalan, dapat menciptakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya penolakan pembangunan jalan ini. Hasil wawancara dengan Wali Nagari Batipuh Ateh menyatakan sebagian besar masyarakatnya adalah Masyarakat Minangkabau menganggap tanah sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Oleh karena itu, apabila pemerintah berencana melakukan pembangunan, mereka harus berhadapan dengan pemilik tanah yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan jalan.

Pembangunan jalan ini mendapat penolakan dari pemilik tanah, jalan saat ini dalam proses pembangunan dan sekarang ini menjadi terhambat akibat penolakan dan perlawanan dari pemilik tanah. Hal ini tersebut membuat terbengkalainya pembangunan jalan Gauang ke Subarang. Pembangunan jalan hingga saat ini belum selesai karena masih ada penolakan dari sebagian warga dan juga ada pertentangan dengan pemilik tanah yang terkena dampak dari proyek tersebut. Karena hal ini terus berlangsung, maka pembangunan jalan belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Dari permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian yaitu **Mengapa terjadi resistensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif antara Jorong di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum untuk mendeskripsikan resistensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif antar jorong di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan kronologis resistensi pembangunan jalan alternatif.
- 2) Mendeskripsikan bentuk-bentuk resistensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif.
- 3) Mendeskripsikan alasan-alasan penolakan pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat:

1.4.1 Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial terutama bagi studi

Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi yang berkaitan resistensi pemilik tanah antar jorong di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memberikan bahan rujukan atau masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
- 2) Memberikan bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah khususnya nagari untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah konflik seperti dalam merumuskan kebijakan dalam penanggulangan masalah konflik yang sering terjadi antar anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Resistensi

Resistensi merupakan sikap pertentangan dan perlawanan yang dilakukan atas dasar penolakan terhadap suatu hal yang bertentangan. Menurut Suriadi, Barnard, dan Jonathan, resistensi dapat diartikan sebagai tindakan penolakan atau perlawanan terhadap perubahan yang dianggap tidak sesuai. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada pada posisi yang lemah atau struktur bawah, sebagai upaya untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dengan pihak yang lebih kuat, seperti penguasa dan pengusaha. Dalam konteks ini, resistensi dianggap sebagai cara untuk menghindari penindasan oleh pihak yang lebih kuat (Suriadi 2008:52).

Berdasarkan konsep James Scott dalam Hardt (2000:321), resistensi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat kelas bawah

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tindakan tersebut meliputi penolakan atau pengurangan tuntutan yang diberikan oleh kelas atas seperti tuan tanah, negara, atau pemilik mesin, serta pengajuan tuntutan sendiri seperti pekerjaan, lahan, kemurahan hati, dan penghargaan. Tujuan dari resistensi adalah mendapatkan reaksi dari pihak yang dilawan, sehingga dapat membangun keseimbangan dan kesetaraan dalam situasi yang menghimpit kelompok lemah akibat tindakan atau kebijakan kelompok yang lebih kuat. Oleh karena itu, resistensi juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai demokrasi yang memberikan kebebasan dan kesetaraan yang sebenarnya (Hardt & Negri, 2000:223)

Dalam Alisjahbana (2005 : 23), Scott menggunakan konsep "Every Day Form Resistance" yang merupakan perjuangan sehari-hari yang sederhana namun dilakukan secara berkelanjutan. Scott menyatakan bahwa resistensi adalah semua tindakan yang dilakukan oleh kelas bawah untuk menolak tuntutan dari pihak atas, seperti pajak dan sewa. Kelompok atas memberlakukan kebijakan tersebut pada kelompok bawah sehingga kelompok bawah melakukan penolakan untuk meredakan tuntutan pajak yang diberlakukan..

Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan berupa bentuk ketidakpatuhan terhadap sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Resistensi dapat dilakukan apabila ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dalam jangka waktu yang pendek untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Menurut Scott (dalam Alisjahbana, 2005: 40) ada dua resistensi sebagai berikut:

1. Resistensi terbuka atau juga disebut sebagai protes sosial atau demonstrasi, ialah bentuk resistensi yang diorganisir dengan sistematis dan memiliki prinsip. Manifestasi yang dilakukan dalam bentuk ini dapat berupa cara-cara kekerasan seperti pemberontakan.
2. Resistensi tertutup atau juga disebut sebagai resistensi simbolis atau ideologis, merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. Contoh dari bentuk resistensi ini meliputi gossip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.

Bersumber pada definisi Scott diatas bahwa alasan masyarakat kelas bawah melakukan resistensi ialah untuk menolak kebijakan kelas atas yang dikenakan kepada kelas bawah. Tujuan masyarakat kelas bawah untuk melunakkan segala tuntutan kelas atas ataupun menghapus tuntutan itu dan menggantinya dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Resistensi dilakukan pihak bawah tidak akan mengurangi rasa hormat mereka kepada pihak atas yang lebih berkuasa.

1.5.2 Konsep Pembangunan

Pembangunan memicu interaksi dalam masyarakat dari interaksi ini muncul praktik gotong royong. Aktivitas gotong royong mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang kuat untuk menjamin hak dan kelangsungan hidup warga masyarakat. Pembangunan adalah proses historis yang terus berlangsung dan tidak pernah berhenti, serta perubahan itu sendiri selalu terjadi. Pembangunan adalah upaya manusia untuk meningkatkan nilai suatu hal yang sudah ada, dan sejalan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban sosial dan kebudayaan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan (Nasrullah, 2016: 6).

Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:4), pembangunan desa merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah desa untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di desa dengan cara yang terencana dan membawa dampak positif pada kemajuan desa, baik dalam aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari desa, bantuan pemerintah, organisasi/lembaga domestik maupun internasional.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlimpahan warga setempat, sehingga partisipasi masyarakat memegang peranan yang signifikan dalam proses tersebut. Karena tujuan pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari daerah tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi strategi penting dalam menangani permasalahan pembangunan desa, seperti kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Ada 2 jenis pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik, menurut B.S. Muljana, adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan berupa infrastruktur atau prasarana yang terdiri dari bangunan fisik atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, logistik, pemasaran barang dan jasa, serta kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan

pertahanan keamanan. Sementara menurut Kuncoro, pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Pembangunan non-fisik, di sisi lain, tercipta dari dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada program pembangunan fisik saja, tetapi juga bergerak dalam pembangunan non-fisik untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kedua jenis pembangunan tersebut.

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, digunakan teori konflik Lewis Coser. Menurut Coser, konflik merupakan suatu proses yang berfungsi sebagai alat dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat timbul antara dua pihak atau lebih dalam kelompok-kelompok yang berbeda, dan dapat memperkuat identitas kelompok serta menjaganya agar tidak hilang dalam masyarakat sekitarnya. Coser menyatakan bahwa konflik adalah mekanisme yang penting dalam perubahan sosial dan penyesuaian, dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, konflik yang tersembunyi atau tidak terlihat dapat tidak memberikan dampak positif pada hubungan sosial yang terjadi (Margareth, 2007: 107).

Dalam pandangan Coser, konflik sosial memiliki kesamaan dengan pandangan George Simmel yang melihat keagresifan atau permusuhan sebagai sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan diperhatikan dalam hubungan yang intim dan tertutup seperti cinta dan rasa benci. Menurut Coser, hostile feeling adalah penyebab dari konflik yang terbuka (overt conflict) dan menambahkan

unsur perilaku permusuhan (hostile behavior), yang pada gilirannya menimbulkan situasi konflik (Susan, 2009: 54)

Lewis Coser berpendapat bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Pertama, anggota yang berada di bawah dalam sistem yang tidak setara lebih mungkin untuk memulai konflik sebagai akibat dari distribusi sumber daya yang langka yang tidak adil dan rendahnya tingkat mobilitas pada posisi yang lebih istimewa. Kedua, bawahan lebih cenderung memulai konflik dengan atasan sebagai akibat dari rasa kurangnya yang relatif karena meningkatnya ketidakadilan yang terkait dengan pengalaman sosialisasi bawahan yang tidak menghasilkan kendala ego internal serta kegagalan atasan untuk menerapkan batasan eksternal pada bawahan (Turner, 1998: 172).

Dalam tulisannya, Coser memperhatikan adanya konflik eksternal dan internal dalam masyarakat. Konflik eksternal memiliki potensi untuk membentuk dan memperkuat identitas kelompok. Menurut Coser, konflik ini mendorong pembentukan batasan di antara kelompok-kelompok dalam sistem sosial sehingga memperkuat kesadaran dan identitas kelompok. Konflik eksternal juga dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam pengorganisasian kelompok dengan adanya kelompok identitas di luar mereka yang menjadi acuan negatif. Sementara itu, konflik internal juga memiliki fungsi positif bagi kelompok identitas dalam mengoreksi perilaku anggota yang dianggap melanggar norma kelompok. Konflik internal juga menjadi mekanisme bertahan bagi kelompok dalam mempertahankan eksistensinya (Susan, 2009:55-56).

Lewis Coser menyampaikan beberapa konsep tentang konflik sosial diantaranya fungsi sosial, katup penyelamat (*safety valve*), konflik realistik dan non realistik.

1. Konflik Realitas

Dalam teorinya, Coser menjelaskan tentang konflik realistik yang memiliki karakteristik sebagai berikut: konflik ini timbul dari rasa kekecewaan terhadap tuntutan khusus dalam hubungan dan harapan keuntungan individu terhadap objek kekecewaan tersebut. Konflik ini dipicu oleh keinginan untuk mencapai sesuatu (*expectations of gains*), dan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Konflik ini akan berakhir jika pelaku menemukan alternatif yang sepadan dan memuaskan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konflik realistik, terdapat pilihan-pilihan yang fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan, tergantung pada penilaian masing-masing partisipan

Dalam teori konflik, konflik realistik dianggap sebagai pemicu utama perubahan sosial. Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi sistem karena memberikan kebebasan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang lebih efektif atau perubahan dapat memenuhi kebutuhan pribadi anggota. Konflik ini muncul dari rasa frustrasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan keuntungan yang diharapkan oleh anggota, dan memiliki sumber yang konkret dan bersifat material seperti perebutan sumber daya ekonomi atau wilayah. Jika sumber yang diperebutkan telah diperoleh dan ada cara yang tidak melibatkan konflik, maka konflik tersebut dapat diatasi dengan baik. Selain itu, konflik realistik juga

melibatkan pilihan-pilihan fungsional yang dipilih berdasarkan penilaian partisipan untuk mencapai tujuan mereka.

2. Konflik Non-Realistis

Konflik Nonrealistis adalah jenis konflik yang tidak muncul dari persaingan tujuan yang bermusuhan, melainkan dari kebutuhan untuk mengurangi ketegangan dari setidaknya satu pihak. Konflik ini terjadi tanpa terkait dengan isu substansial yang menjadi penyebab konflik, melainkan dipicu oleh prasangka atau permusuhan terhadap pihak lawan yang mendorong tindakan agresi untuk menghancurkan lawannya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai penyebab konflik tidak penting, yang penting adalah bagaimana untuk mengalahkan lawan. Karena itu, metode manajemen konflik untuk jenis ini menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan paksaan (Cosser, 1956: 53-54)

Konflik Nonrealistis terjadi karena dorongan keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar etnis, dan kepercayaan lainnya. Tujuan dari konflik Nonrealistis adalah untuk menurunkan ketegangan atau memperkuat identitas suatu kelompok dengan cara yang kadang-kadang melibatkan bentuk kekejaman yang sebenarnya berasal dari sumber lain. Penyelesaian konflik Nonrealistis biasanya melibatkan menggunakan kekuasaan, kekuatan, dan paksaan, daripada penyelesaian berdasarkan isu substansi. (Susan, 2009: 55)

1.5.4 Penelitian Relevan

Penelitian tentang perselisihan terkait pembangunan jalan bukanlah hal yang baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan studi terhadap konflik tersebut, seperti yang diuraikan di bawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Masyur Hadi Wijaya (2022) dari Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur dengan judul “Penyelesaian Konflik Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif”. Penelitian ini membahas bentuk konflik yang terjadi didalam pembangunan jalan alternatif dan cara penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari. Teori yang digunakan teori sebab-sebab timbulnya konflik seperti teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transparansi dan teori kebudayaan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan hasil wawancara

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rudy Nurbai (2018) dari Universitas Andalas Padang dengan judul “Konflik Masyarakat Bungus Timur Dengan Pemerintahan Kota Padang Dalam Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Umum”. Penelitian ini menjelaskan kronologis konflik serta menganalisis penyebab dan aktor yang terlibat dalam konflik antara masyarakat dengan Pemko Padang. Teori yang digunakan adalah teori transformasi konflik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Puspita Sari (2018) dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan Gresik”. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk konflik, menjelaskan *safety valve*, dan mendeskripsikan resolusi konflik pada pelebaran jalan Duduksampeyan. Teori yang digunakan adalah teori konflik Lewis Coser. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 2
Penelitian Relevan**

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Masyur Hadi Wijaya 2022 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur	Penyelesaian Konflik Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif	Membahas tentang konflik pembangunan jalan	bentuk konflik yang terjadi didalam pembangunan jalan alternatif dan cara penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastuktur jalan alternatif di Desa Mekarsari

2	Rudy Nurbai 2018, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang	Konflik Masyarakat Bungus Timur Dengan Pemerintahan Kota Padang Dalam Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Umum	Membahas tentang konflik pembangunan jalan	Skripsi ini menjekaskan menjelaskan kronologis konflik serta menganalisis penyebab dan aktor yang terlibat dalam konflik antara masyarakat dengan Pemko Padang.
3	Kurnia Puspita Sari 2018 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya	Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan Gresik	Membahas tentang konflik pembangunan jalan	Skripsi ini bentuk-bentuk konflik, menjelaskan <i>savety valve</i> , dan mendeksripsikan resolusi konflik pada pelebaran jalan Duduksampeyan

Sumber Data: Data Primer 2023

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan menganalisis hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perilaku individu atau kelompok, serta proses sosial dalam masyarakat. Peneliti ini lebih fokus pada proses dan makna yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah, intensitas, dan frekuensi. Pendekatan kualitatif dipilih karena merupakan metode penelitian dalam ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data

berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan tindakan manusia. Peneliti tidak berusaha menghitung atau mengukur data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Menurut Moleong (2004: 6), pendekatan kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Afrizal (2014: 17) menjelaskan bahwa alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena kata-kata dan tindakan manusia dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir,1988: 63).

Sugiyono (2005: 21) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai topik yang dibahas resitensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan antar jorong di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Realitas sosial merupakan realitas yang dibangun oleh manusia, sehingga peneliti ikut serta dalam membangun realitas sosial tersebut melalui situasi dalam penelitian yang dilakukannya (Creswell, 1994:4). Peneliti akan menggali informasi sesubjektif mungkin dan sesuai dengan fakta dan realitas empiris yang terjadi

dilapangan berupa penggambaran munculnya masalah ataupun kenapa masyarakat pemilik tanah masih menolak terhadap pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

1.6.2 Informan Penelitian

Afrizal (2014: 139) menjelaskan bahwa informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya sendiri, orang lain, atau suatu kejadian atau hal kepada peneliti atau pewawancara yang melakukan wawancara mendalam. Teknik purposive sampling (pemilihan informan secara sengaja) digunakan oleh peneliti untuk memilih informan yang kompeten dengan masalah penelitian. Peneliti secara sengaja mewawancarai informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dan keadaan informan tersebut diketahui oleh peneliti

Dengan mengetahui teknik purposive sampling, maka peneliti berpedoman berdasarkan kriteria di atas dalam pencarian informan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian difokuskan pada masalah yang relevan sehingga data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh bias. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian merupakan sumber informasi yang penting dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian (Afrizal, 2014: 139) mengkategorikan dua informan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Informan pelaku adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya sendiri, tindakannya, pemikirannya, interpretasinya, atau pengetahuannya. Mereka merupakan subjek penelitian itu sendiri yang memberikan

keterangan kepada peneliti. Informan pelaku pada penelitian ini adalah pemilik tanah dari lahan pembangunan jalan alternatif di Nagari Batipuh Ateh. Kriteria informan pelaku yaitu, sebagai berikut:

- a. Perempuan yang memiliki tanah yang akan dijadikan jalan yaitu Suku Panyalai (dua keluarga) dan Sikumbang (satu keluarga)
- b. Pemilik tanah yang telah menyetujui pembangunan jalan.

Tabel 1. 3
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	Labuak	IRT	Balai Sabuah	Pemilik Tanah yang menolak
2	Mukhlis	PNS	Balai Gamba	
3	Warnida Wati	Petani	Balai Sabuah	
4	Nur Azizah	PNS	Balai Sabuah	
5	Darnalis	Pedagang	Balai Sabuah	Pemilik tanah yang menyetujui
6	Elivita Wati	Penjahit	Balai Sabuah	

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

2. Informan pengamat adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai orang lain, suatu kejadian, atau suatu hal. Informasi yang diberikan ini dapat dikatakan sebagai orang yang tidak menjadi subjek penelitian, namun mengetahui tentang orang yang diteliti atau dapat disebut juga sebagai agen atau saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini informan pengamat adalah mereka yang memahami permasalahan pembangunan jalan. Kriteria informan pengamat yaitu, sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari Batipuh Ateh periode 2013-2020
 - b. Perangkat Nagari Batipuh Ateh

c. KAN Nagari Batipuh Ateh

Tabel 1. 4
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	Azisman, Dt. Sinaro Alam Nan Putih	Petani	Subarang	Wali Nagari Periode 2009-2020
2	Ridwandi	Kasi	Jambu	Perangkat Nagari Batipuh Ateh
3	Dt Tan Mancayo		Padang	KAN Nagari Batipuh Ateh

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

1.6.3 Data Yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, biasanya data yang dikumpulkan berupa bahasa yang digunakan manusia baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mereka. (Afrizal,2014 : 16-17). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer atau data utama adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) (Moleong, 2004: 155). Wawancara ini membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer yang akan diambil dari penelitian ini berasal dari wawancara mendalam peneliti dengan para informan tentang resistensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif antar jorong di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Ateh Kabupaten Tanah Datar

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dan memberikan relevansi pada penelitian yang dilakukan. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur-literatur tertulis, hasil penelitian sebelumnya, makalah, jurnal, atau berita di media massa ataupun media cetak. Sumber data sekunder ini memberikan informasi tambahan yang dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti. Adapun data sekunder yang telah diperoleh peneliti adalah data yang berhubungan dengan surat-surat yang berkaitan dengan resistensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif Jorong Balai Sabuah dengan Jorong Subarang, serta dokumen lain yang dapat menunjang terjawabnya tujuan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengumpulan dokumen.

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan informan penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi melalui percakapan langsung. Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong (2004:135), tujuan dari wawancara adalah untuk membangun pemahaman tentang orang, organisasi,

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan penelitian

Wawancara mendalam merupakan bentuk wawancara yang tidak terstruktur antara pewawancara dan informan, yang dilakukan secara berulang-ulang, dan merupakan suatu bentuk interaksi sosial antara keduanya. Dengan berinteraksi dan mengali secara mendalam dapat menjelaskan fakta fakta yang terdapat pada proses penelitian. Peneliti mewawancarai informan berdasarkan pedoman wawancara yang dilakukan, saat informan tidak sedang sibuk, sudah mengatur waktu untuk dan melihat kondisi informan dalam keadaan kondusif atau tidaknya.

Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan pelaku dan pengamat yang terlibat langsung dalam proses resistensi pemilik tanah dalam pembangunan jalan alternatif. Dalam melaksanakan wawancara dengan informan penelitian, terdapat berbagai tantangan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan masalah penelitian. Selain itu, informan juga sering menanyakan tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu menjelaskan bahwa tujuan dari wawancara ini adalah untuk tugas akhir kuliah. Dengan cara ini, peneliti dapat tetap mendekati informan dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam

2. Pengumpulan Dokumen

Data sekunder penulis dapatkan diarsip dan dokumen pada dinas dan instansi terkait penelitian ini, seperti data dari Kantor Wali Nagari Batipuh Ateh. Untuk mencapai keabsahan data maka peneliti di sini akan menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara untuk memeriksa keabsahan data dengan memfokuskan perhatian pada faktor-faktor di luar data itu sendiri yang dapat digunakan sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang paling umum digunakan melibatkan pemeriksaan data dengan menggunakan sumber-sumber lainnya sebagai bahan perbandingan. Dengan melakukan triangulasi, dapat meningkatkan validitas dan keandalan data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Artinya data yang telah penulis dapat di lapangan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi setelah itu penulis analisa dengan menggunakan teori yang ada (Moleong, 2004: 178). Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengalami beberapa kendala yang mempersulit upaya untuk membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh informan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketika peneliti meminta dokumen penting, namun pihak terkait menolak memberikan dokumen tersebut dengan alasan kerahasiaan negara, meskipun peneliti sudah menunjukkan surat izin penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti berusaha untuk menemui atasan dari instansi terkait, dan setelah pertemuan dengan atasan instansi tersebut, akhirnya peneliti berhasil memperoleh dokumen yang dibutuhkan.

Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Daftar panduan wawancara, digunakan sebagai acuan dalam merumuskan pertanyaan kepada narasumber.
- 2) Buku catatan dan pena, digunakan untuk mencatat seluruh informasi yang diberikan oleh narasumber

- 3) Perangkat perekam seperti handphone, digunakan untuk merekam seluruh sesi wawancara yang berlangsung
- 4) Kamera di handphone, digunakan untuk memotret peristiwa yang terjadi selama proses penelitian

1.6.5 Unit Analisis

Satuan analisis adalah unit khusus yang berhubungan dengan menentukan jumlah subyek penelitian. Dengan kata lain, ketika melakukan analisis unit, jumlah keseluruhan unit yang akan dijadikan subjek penelitian harus ditentukan. Peneliti melakukan analisis unit ini untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian karena terkadang peneliti masih bingung dalam membedakan antara objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Satuan analisis dalam penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu, sesuai dengan fokus permasalahan yang dihadapi. (Irwan, 2015:87). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, dengan sumber datanya dalah perangkat Nagari Batipuh Ateh.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus selama melakukan penelitian kualitatif. Kegiatan analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan dilakukan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Data yang digunakan sudah dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014:174). Dalam penelitian ini menggunakan analisis data sesuai dengan Model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Kodifikasi Data.

Pada fase ini, peneliti memberikan label atau mengidentifikasi hasil penelitiannya. Hal ini dilakukan dengan cara mereformulasi kembali catatan lapangan yang diambil saat melakukan wawancara, baik dalam bentuk tulisan atau rekaman kemudian membaca catatan, lalu atur informasi penting dan tidak penting dengan menandai data. Setelah itu peneliti akan memberikan perhatian khusus pada informasi penting yang diinginkan. Kemudian peneliti menjelaskan arti dari penggalan tersebut untuk menemukan informasi yang benar dan tepat.

2. Penyajian Data.

Dalam tahapan analisis yang lebih lanjut, peneliti dapat mengelompokkan hasil penelitiannya dan menampilkan hasil tersebut dalam bentuk matriks atau grafik, sesuai dengan saran Miles dan Huberman.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti menafsirkan temuan yang didapatkan dari wawancara atau dokumen sebagai kesimpulan akhir. Setelah menarik kesimpulan, peneliti akan melakukan pengecekan ulang melalui proses koding dan penyajian data untuk memastikan kebenaran dan keabsahan interpretasi yang dilakukan serta menghindari kesalahan yang mungkin terjadi.

1.6.7 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis membagi tiga tahapan penelitian. *Pertama* tahap pra-lapangan, pada tahap ini penulis memulai dengan penulisan Term Of Reference (TOR) yang dimasukkan ke Jurusan Sosiologi sebagai tahap

pertimbangan untuk penulisan proposal setelah dikeluarkannya SK pembimbing pada bulan November, lalu dilanjutkan dengan pembuatan proposal selama 1 bulan penulisan dari bulan November sampai bulan Desember 2022. Setelah penulis melakukan bimbingan mengenai proposal dengan dosen pembimbing dan melalui tahap-tahap perbaikan dan pada bulan Desember proposal diseminarkan. Setelah seminar proposal, penulis melakukan bimbingan kembali terkait dengan pedoman wawancara untuk itu melakukan penelitian yang terkait dengan rencana metode penelitian.

Kedua, tahap penelitian lapangan, pada tahap ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara mendalam yang dimulai dari bulan Januari 2023. Penulis melakukan kegiatan wawancara selama wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara berjalan dengan bebas dan tidak berstruktur sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan. Penulis dalam penelitian ini berusaha bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu informan.

Ketiga, tahap pasca lapangan, pada penelitian ini penulis mulai untuk mengumpulkan data-data yang telah penulis dapatkan sewaktu turun lapangan. Data yang dikumpulkn sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya penulis membuat sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diteliti. Setelah melewati tiga tahap diatas kemudian peneliti mulai menulis hasil temuan dalam penelitian untuk disajikan kedalam bentuk tulisan karya ilmiah.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan atau konteks dimana penelitian dilakukan. Lingkungan tersebut tidak selalu merujuk pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat merujuk pada organisasi atau sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, wilayah yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih daerah Batipuh Ateh sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut memiliki potensi resistensi horizontal dan vertikal bila dibiarkan berlarut larut akan dapat menimbulkan perpecahan pada masyarakat, dan akan dapat menimbulkan antipati terhadap proses pembangunan nagari. Proses pembangunan jalan alternatif ini telah dimulai sejak 2010 dan sampai sekarang (2023) masih belum selesai diduga ada kelalaian penguasa atau tinggi resistensi pemilik tanah. Hal inilah yang memicu minat peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

1. Konflik adalah suatu pertentangan kepentingan yang terjadi antara pemilik tanah dengan perangkat nagari
2. Resistensi adalah suatu perlawanan atau penolakan yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan perangkat nagari untuk mempertahankan masing-masing kepentingannya, sikap penolakan atau perlawanan secara sembunyi-sembunyi dan terang terangan.

- Jalan merupakan sebuah fasilitas yang dirancang untuk memfasilitasi lalu lintas kendaraan, karena dapat memacu berbagai aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalan tersebut

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan Januari sampai bulan April. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 5
Jadwal Rencana Penelitian

No	Nama Kegiatan	2023				
		Jan	Feb	Mar	April	Mei
1	Bimbingan Pedoman Wawancara					
2	Mengumpulkan Data dan Analisis Data					
3	Bimbingan dan Penulisan Skripsi					
4	Ujian Skripsi					